

KEBIJAKAN LUAR NEGERI QATAR DALAM MENGATASI KRISIS TELUK DENGAN ARAB SAUDI TAHUN 2017-2019

Author: Divia Anjeli

(email: divia.anjeli4029@student.unri.ac.id)

Pembimbing: Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si

Bibliografi: 19 Buku, 23 Jurnal, 42 Website

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL. H.R Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru-Pekanbaru 28293
Telp./Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research analyzes Qatar's foreign policy in overcoming its country's diplomatic crisis with Gulf countries, such as Saudi Arabia, United Arab Emirates (UAE), Bahrain, and Egypt. Qatar, as one of the small countries in the Middle East region, can rise; this is, of course, supported by bold foreign policy making and trying not to be bound by the foreign policy of the Saudi Arabian government. However, the bold step taken by Qatar to become a country with a foreign policy based on open-door diplomacy is vehemently opposed by other Gulf states. So to minimize Qatar's influence in the Gulf region, Saudi Arabia, together with the anti-Qatar quartet, imposed diplomatic sanctions on Qatar by severing diplomatic relations and closing all air, sea, and land routes from and to Qatar. This study aims to determine the trigger for the termination of diplomatic relations between Qatar and the anti-Qatar quartet so that the blockade is enforced and how to implement an open-door diplomacy foreign policy.

This research uses a qualitative research method, with a literature study using secondary data sources obtained through books, journals, articles, the internet, and documents related to this research. This study uses the theory of Foreign Policy.

This research shows that the decision taken by the Qatari leader to change its foreign policy led to disapproval from countries in the Middle East, thus bringing the relations of the Gulf countries towards disharmony and causing a diplomatic crisis. However, as a sovereign state, Qatar has the right to determine the foundation and principles of its government's foreign policy. As well as restoring relations between Qatar and the anti-Qatar quartet, both sides agreed to end the crisis through diplomatic dialogues and negotiations, lifting the sanctions blockade on Qatar.

Keywords: *Foreign Policy, Diplomacy, Blockade, Independent, Open Door Policy.*

PENDAHULUAN

Tulisan ini akan menganalisis bagaimana kebijakan luar negeri Qatar dalam menghadapi isu krisis Teluk negaranya dengan Arab Saudi. Posisi Qatar yang merupakan salah satu negara terkecil dapat bangkit dan mengambil peran penting di kawasan Timur Tengah. Keberhasilan Qatar ini tentunya didukung oleh penggunaan kebijakan luar negerinya untuk dapat memposisikan negaranya di dalam sistem internasional dan didukung dengan kekayaan yang dimiliki Qatar yaitu cadangan gas alam dan salah satu perusahaan media terbesar yaitu Al-Jazeera.

Arab Saudi dan Qatar merupakan kedua negara yang memiliki kedekatan secara geografis, kedekatan ini menjadikan Arab Saudi dan Qatar sering menjalin hubungan kerja sama mulai dari bidang ekonomi, politik hingga sosial. Hal ini terbukti dengan tergabungnya kedua negara ini ke dalam *Gulf Cooperation Council* (GCC) yang merupakan organisasi negara-negara Teluk yang di bentuk pada tahun 1981.

Namun, pada pertengahan abad ke-20 kedua negara ini mengalami ketegangan hubungan diplomatik. Keterkaitan Qatar yang mendukung kelompok teroris, ikut campur dalam urusan internal negara tetangga, menjalin hubungan kerja sama dengan Iran, Qatar yang dianggap melindungi dan mendukung tokoh-tokoh yang melopori gerakan demokrasi di Arab, serta memiliki agenda yang tidak sesuai dengan *Gulf Cooperation Council* (GCC) merupakan beberapa alasan yang menyebabkan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan blokade terhadap Qatar beserta dengan tiga belas tuntutan terhadap pemerintahan Qatar tepatnya pada tanggal 5 Juni 2017.¹

¹ Patrick Wintour, "Qatar Given 10 Days to Meet 13 Sweeping Demands by Saudi Arabia," The

Namun, permasalahan utama yang menyebabkan Arab Saudi bersama dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Mesir melakukan blokade terhadap Qatar adalah permasalahan mengenai perbedaan kebijakan luar negeri. Arab Saudi dikenal sangat tradisional dalam menjalankan sistem pemerintahan, sedangkan Qatar dikenal sebagai salah satu pendukung modernitas yang identik dengan liberalisasi, yang mana modernitas ini diaplikasikan dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan-kebijakan ekonomi serta ideologi negara. Hal ini terlihat pada masa kepemimpinan Emir Hamad Al-Thani yang mengedepankan pembangunan dan melakukan liberalisasi serta Sheikh Hamad memilih untuk tidak terikat dengan ideologi Islam tertentu seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi.²

Kebijakan blokade dan dikeluarkannya tuntutan oleh Arab Saudi dan negara Teluk lainnya terhadap Qatar tentunya akan berdampak pada keadaan domestik negara Qatar. Dari segi ekonomi, Arab Saudi memerintahkan seluruh Bank Sentral milik Arab Saudi untuk tidak melakukan segala jenis transaksi dengan Bank Qatar. Ketersediaan pasokan makanan yang datang dari Arab Saudi terjebak di perbatasan Arab Saudi karena di tutupnya jalur masuk melalui Qatar sehingga menyebabkan krisis pangan di Qatar.³ Tidak hanya sanksi ekonomi dan pasokan makanan yang dirasakan oleh Qatar, beberapa warga Qatar yang tinggal di

Guardian, 2017, <https://www.theguardian.com/world/2017/jun/23/close-al-jazeera-saudi-arabia-issues-qatar-with-13-demands-to-end-blockade>.

² Broto Wardoyo, "Rivalitas Saudi-Qatar Dan Skenario Krisis Teluk," *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2018): 82–83, <https://doi.org/10.18196/hi.71127>.

³ J Macaron, *Crisis In The Gulf Cooperation Council : Challenges And Prospects* (Washington DC: Arab Center Washington DC, Inc., 2017), 59.

luar Qatar khususnya di Arab Saudi mengalami kesulitan karena adanya peraturan untuk meninggalkan Arab Saudi dalam waktu dua minggu tersebut sehingga menimbulkan krisis kemanusiaan bagi warga Qatar yang berada di Arab Saudi.

KERANGKA TEORI

Teori Kebijakan Luar Negeri

Teori Kebijakan Luar Negeri yang digunakan adalah teori dari James N. Rosenau yang berdasarkan pada tulisannya yang berjudul *Comparing Foreign Policies: Why, What, How* pada buku *Comparing Foreign Policies, Theories, Finding, and Methods* menjelaskan definisi dari *foreign policy* ini sebagai,

*"foreign policy as authoritative actions taken by governments or are committed to take in order either to maintain the desirable aspects of the international environment or to amend its undesirable aspects."*⁴

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri merupakan segala cara yang dilakukan oleh negara melalui kegiatan dan sikapnya untuk mendapatkan keuntungan dari lingkungan eksternal maupun internalnya. Selain itu Rosenau juga mendefinisikan kebijakan luar negeri memiliki tujuan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.

Foreign Policy as a set of commitments to and plan for action

Tulisan ini juga akan menggunakan konsep kebijakan luar negeri menurut Rosenau yaitu kebijakan luar negeri sebagai alat untuk berkomitmen dan berencana dalam bertindak. Kebijakan luar negeri ini berfokus pada tindakan yang dikeluarkan oleh para pembuat kebijakan untuk menjaga situasi lingkungan eksternalnya yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri, konsep ini memiliki tujuan spesifik serta *instrument* khusus untuk mencapai tujuan dan menghadapi tantangan dari lingkungan eksternal.⁵ Sehingga pada tulisan ini posisi Qatar yang mendapatkan tuntutan dan blokade dari Arab Saudi mengharuskan Qatar mengambil keputusannya melalui kebijakan luar negerinya untuk mempertahankan posisi negara dan mengamankan kepentingan nasional, dengan cara membangun kebijakan luar negeri yang lebih fleksibel dan menjalin kerja sama dengan negara-negara di luar kawasan Teluk.

Preservative Adaptation

Pola kebijakan luar negeri *preservative adaptation* menurut Rosenau ini memiliki makna dimana suatu negara memberikan respon terhadap tekanan dan perubahan yang datang dari sistem internal dan juga lingkungan eksternal.⁶ Dalam tulisan ini Qatar yang mendapatkan tuntutan dan tekanan dari negara-negara Teluk mengakibatkan sistem internal negara nya harus beradaptasi dengan lingkungan eksternal

⁴ James N. Rosenau, "Comparing Foreign Policies: Why, What, How," in *Comparing Foreign Policies, Theories, Findings, and Methods*, (New York: John Wiley & Sons, 1974), 6.

⁵ Kenneth W. Thompson James N Rosenau, Gavin Boyd, *World Politics: An Introduction* (New York: The Free Press, 1976), 16–17.

⁶ Nikolaj Petersen, "Adaptation as a Framework for the Analysis of Foreign Policy Behavior," *Cooperation and Conflict* 12, no. 4 (1977): 221–50, <https://doi.org/10.1177/001083677701200402>.

dari Qatar dengan mengeluarkan kebijakan luar negeri yang berfokus pada penggunaan diplomasi terbuka dan menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara di luar negara Teluk, seperti Iran, Turki, Eropa dan Amerika Serikat.

Level Analisis: Negara

Pada tulisan ini, level analisis yang digunakan adalah negara bangsa. Menurut Mohtar Mas'ood level analisis negara bangsa adalah level analisis yang di fokuskan pada proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, yaitu kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara sebagai suatu kesatuan yang utuh.⁷ Qatar merupakan aktor utama dalam tulisan ini yang dilihat dari kebijakan luar negeri Qatar dalam mengatasi kisis diplomatik dengan kuartet anti Qatar.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat kualitatif. Metode ini digunakan dalam upaya mencari dan mengumpulkan, menyusun, dan menafsirkan data yang sudah ada untuk menguraikan secara sistematis. Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini didapatkan melalui data sekunder. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *study literature*, yaitu mengumpulkan segala data dan informasi berupa buku, jurnal, artikel, internet, makalah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dan sesuai dengan judul yang akan di teliti.

PEMBAHASAN

KRISIS TELUK

Negara Teluk merupakan sekumpulan dari negara-negara Arab yang berbatasan dengan Teluk Persia. Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Oman dan Bahrain, merupakan tujuh negara yang termasuk ke dalam negara Teluk. Negara Teluk kecuali Iraq tergabung ke dalam satu aliansi di bidang politik dan ekonomi yang dikenal dengan nama *Gulf Cooperation Council* (GCC) yang didirikan pada tahun 1981 tepatnya di Riyadh, Arab Saudi.⁸

Pada pertengahan abad ke-20 tepatnya pada tahun 2000 mulai banyak permasalahan yang muncul di antara negara-negara Teluk tersebut khususnya perdebatan yang terjadi diantara Arab Saudi dan Qatar.

Krisis diplomatik Qatar atau yang sering dikenal sebagai krisis teluk merupakan suatu peristiwa dimana terjadinya penurunan keharmonisan hubungan antara Qatar dan Arab Saudi. Pasca berakhirnya kekuasaan Emir Hamad al-Thani di tahun 2013 dan kemudian digantikan oleh Tamim al-Thani pada tanggal 25 Juni 2013 pergerakan pemerintahan Qatar menjadi lebih agresif dan mulai mencoba untuk melepaskan diri dari pengaruh Arab Saudi terhadap negaranya. Qatar yang pada awalnya masih mengikuti gaya pemerintahan dari Arab Saudi yang berlandaskan islam dan hukum syariah tiba-tiba beralih kepada gaya pemerintahan yang lebih otonom dan terbuka. Hal ini tentunya mendapatkan tentangan besar dari Arab Saudi dan sekaligus merupakan ancaman bagi

⁷ Mas'ood Mohtar, *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis Dan Teorisasi* (Yogyakarta: PAU - SS UGM, 1989).

⁸ Adam Zeidan, "Gulf Cooperation Council," Britannica.com, n.d., <https://www.britannica.com/topic/Gulf-Cooperation-Council>.

kekuasaan Arab Saudi terhadap negara-negara di kawasan Teluk.

Pada masa pemerintahan Sheikh Tamim Al-Thani di tahun 2013, Qatar telah mengalami dua kali krisis diplomatik antara negaranya dengan negara-negara Arab terkhusus Arab Saudi. Krisis diplomatik pertama terjadi di tahun 2014 tepatnya pada tanggal 5 Maret, yang mana berujung kepada penarikan duta besar dari Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) yang bertugas di Doha, Qatar. Krisis diplomatik yang melibatkan Qatar dengan Arab Saudi, Bahrain dan UEA ini dapat diselesaikan pada tahun 2014 tepatnya pada bulan November setelah dilakukannya mediasi oleh Kuwait.

Namun, di tahun 2017 hubungan antara Qatar dan Arab Saudi kembali memanas, karena adanya tindakan Qatar yang melakukan perubahan prinsip kebijakan luar negeri sehingga menyebabkan Arab Saudi memutuskan hubungannya dengan Qatar tepatnya di tanggal 5 Juni 2017. Tidak hanya masalah perbedaan kebijakan luar negeri, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Qatar yang dianggap Arab Saudi sebagai ancaman sehingga Arab Saudi bersama dengan negara-negara Arab lainnya (UEA, Yaman, Mesir dan Bahrain).

Keterkaitan Qatar dengan Ikhwanul Muslimin

Arab Saudi menganggap Qatar telah memberikan dukungan kepada kelompok Ikhwanul Muslimin yang merupakan kelompok islam yang menganut aliran islam modernis yang didirikan oleh Hasan al-Bana di Mesir pada tahun 1928.

Melalui Al-Jazeera Qatar memberikan kesempatan kepada Sheikh Yusuf Qordhowi untuk tergabung

sekaligus menjadi pembawa acara dengan judul “Syariat dan Kehidupan”. Syekh Yusuf Qordhowi yang merupakan seorang cendekiawan yang berasal dari Mesir yang dikenal sebagai seorang yang menganut syariat islam modern dan dianggap sebagai ancaman oleh Arab Saudi dan negara Arab lainnya. Hubungan Qatar dengan Yusuf Qordhowi tentunya memberikan jalan masuk kepada kelompok Ikhwanul Muslimin untuk mendekati diri kepada kerajaan Qatar termasuk salah satunya adalah untuk dapat terlibat dalam penggunaan saluran televisi terbesar milik Qatar yaitu Al-Jazeera.

Adanya keterkaitan Qatar dengan Ikhwanul Muslimin yang merupakan kelompok islam modernitas (shufi) yang mendukung demokrasi, menolak adanya penjajahan dan negara monarki yang memiliki hubungan dengan barat tentunya sangat bertolak belakang dengan Arab Saudi bersama organisasi Wahabi di belakangnya yang menganut islam tradisional (salafi) yang cenderung intoleren terhadap istilah “demokrasi” serta tetap mempertahankan sistem pemerintahan monarki di Arab Saudi. Sehingga dengan terjalannya hubungan Qatar dengan Ikhwanul Muslimin menunjukkan bahwa Qatar telah melanggar keputusan yang telah disepakati dalam Perjanjian Riyadh sehingga menyebabkan Arab Saudi dan negara Arab lainnya melakukan tindakan blokade terhadap pemerintahan Qatar.

Al Jazeera sebagai alat propaganda bagi Qatar.

Al-Jazeera merupakan perusahaan media yang penuh kontroversi karena keberaniannya dalam memberitakan seluruh permasalahan yang terjadi di kawasan Timur Tengah secara bebas

dengan memberitakan isu-isu yang sensitif.⁹

Salah satu program Al-Jazeera yang mendapatkan kritikan dan membangun amarah Arab Saudi adalah program yang diluncurkan pertama kali setelah dibentuknya Al-Jazeera yaitu *The Opposite Direction* dan *Sharia and Life*. Program *Sharia and Life* merupakan salah satu program utama Al-Jazeera pada perayaan 10 tahun Al-Jazeera yang mana program *Sharia and Life* ditayangkan satu kali dalam seminggu dengan durasi satu jam penayangan. *Sharia and Life* adalah salah satu program yang dibawakan oleh Yusuf Al-Qardhawi yang merupakan seorang cendekiawan agama yang berasal dari Mesir. *Sharia and Life* mendapatkan banyak kritikan dari negara-negara Arab lainnya karena program ini membahas mengenai hubungan antara demokrasi dan islam, isu sosial yang dipandang dari sudut agama, isu mengenai perempuan dalam islam, serta pembahasan mengenai ekonomi dalam islam.¹⁰

Keterkaitan Qatar dengan Iran

Pasca diberlakukannya tindakan blokade, Qatar mengalami krisis ekonomi dan berdampak kepada kesediaan bahan pangan, karena Qatar telah kehilangan mitra dagangnya yaitu Arab Saudi, Bahrain dan UEA yang selama ini memasok persediaan bahan pangan kepada Qatar. Sehingga untuk mengatasi krisis yang terjadi di Qatar, Sheikh Tamim al-Thani mengambil tindakan untuk memperbaiki hubungannya dengan Iran.

⁹ Shawn Powers, "The Geopolitics of The News: The Case of The Al-Jazeera Network," no. August (2009): 24.

¹⁰ Ningtyas Rosania ayu, "Peran Al-Jazeera Dalam Pemutusan Hubungan Diplomatik Arab Saudi Terhadap Qatar Tahun 2017" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), 90–91, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31356/%5BBAB4%5D.pdf?sequence=8&isAllowed=y>.

Terjalannya hubungan antara Qatar dan Iran, tentunya memberikan ancaman terhadap posisi hegemoni Arab Saudi di kawasan Timur Tengah. Iran merupakan satu negara yang cukup kuat, dan negara yang berani dalam menyiarkan berita mengenai gerakan revolusi islam kepada negara-negara lain dengan memanfaatkan jaringan radio milik pemerintah Iran yang memiliki beberapa cabang yang tersebar di 45 negara.¹¹ Adanya kesamaan yang dimiliki oleh Iran dan Qatar dalam memiliki sumber daya gas bumi tentunya akan menjadi ancaman bagi posisi kekuatan Arab Saudi, sehingga Arab Saudi menganggap kerja sama yang dijalin oleh Qatar dan Iran ini dapat menghancurkan kedaulatan negaranya.

Dampak Krisis Diplomatik Terhadap Perekonomian dan Ketahanan Pangan

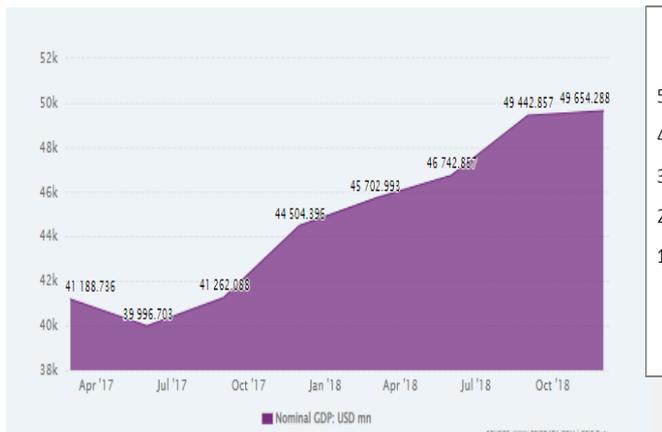
Setelah Arab Saudi memberlakukan embargo ekonomi dan blokade terhadap Qatar seluruh kegiatan impor baik makanan maupun barang yang masuk ke Qatar diberhentikan. Angka pertumbuhan ekonomi Qatar menunjukkan keterlambatan terutama disebabkan oleh rendahnya permintaan terhadap sektor minyak. Satu bulan setelah diberlakukannya blokade PDB rill Qatar berada di angka 2,4% dan meningkat sebesar 0,6% di bulan kedua. Maka pada pertengahan tahun 2017 ekonomi Qatar telah tumbuh sebesar 0,5% dari penurunan yang sangat luar

¹¹ Jason J. McSparren, Hany Besada, and Vasundhara Saravade, "Qatar's Global Investment Strategy for Diversification and Security in the Post-Financial Crisis Era," *Centre on Governance Research Paper Series*, no. June 2020 (2017): 7, https://socialsciences.uottawa.ca/governance/sites/socialsciences.uottawa.ca.governance/files/cog_research_paper_02_17_en.pdf.

biasa pada triwulan pertama di tahun 2017 yang berada di angka -1,5%.¹²

Adanya penurunan pendapatan negara Qatar dari April 2017 dengan angka sekitar 42 juta USD turun sebanyak 2 juta USD per Juli 2017 diangka 39 juta USD.

Gambar: PDB Qatar per April 2017- Oktober 2018



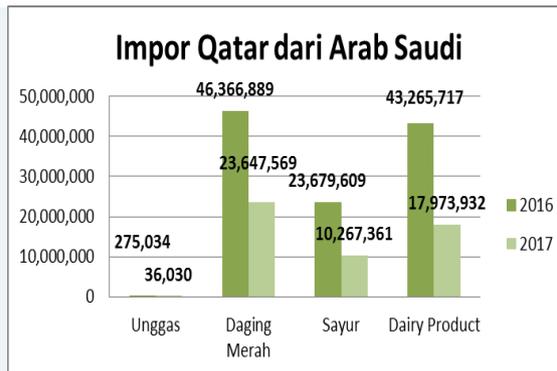
Sumber: Ceic Data¹³

Tidak hanya berdampak pada stabilitas perekonomian Qatar, ditutupnya seluruh akses perdagangan oleh Arab Saudi baik melalui jalur udara, laut dan darat sangat berdampak pada kegiatan impor dan ekspor negara Qatar dengan negara-negara Teluk lainnya. Qatar sangat bergantung pada impor bahan pangan yang sebagian besar berasal dari Arab Saudi.

Namun, sejak penutupan rute perbatasan darat menuju Qatar yang merupakan salah satu rute penting dalam kegiatan impor bahan pangan yang berasal dari Arab Saudi, UEA, Turki serta Yordania mengakibatkan penurunan

sebesar 38% dari tahun sebelumnya. Arab Saudi merupakan eksportir utama bagi Qatar dalam pemenuhan kebutuhan pangannya, terutama dalam ekspor unggas, daging merah, sayur dan buah-buahan, serta dairy product seperti susu dan keju yang 72% nya Qatar bergantung kepada Arab Saudi.¹⁴

Grafik: Impor Qatar dari Arab Saudi



Sumber: UN Comtrade

Di tahun 2016 Qatar telah mengimpor unggas ke negaranya sekitar \$275,034 di tahun 2017 ke angka \$36.030. Qatar juga mengimpor beberapa jenis daging yang pada tahun 2016 Qatar mengimpor sebanyak \$46.336.889 di tahun 2017 menjadi \$23.647.569.

Setelah pemberlakuan blokade tepat pada tanggal 5 Juni 2017, segala jenis kerja sama antara Qatar dan Arab Saudi mulai mengalami penurunan dan kegiatan ekspor dan impor ini telah berhenti di tahun 2018.

¹² Erwan Madelénat, "Coface Economic Publications," *Coface Economic Publications Panorama*, no. March 2017 (2020): 2.

¹³ Ceic Data, "Qatar PDB Nominal," ceicdata.com, 2017, <https://www.ceicdata.com/id/indicator/qatar/nominal-gdp>, diakses pada tanggal 31 Maret 2022.

¹⁴ Kym Wyatt, "Where Does Our Food Come From? An Insight Into Qatar's Food Industry," dohafamily.com, 2020, https://dohafamily.com/living_in_doha/where-does-our-food-come-from-an-insight-into-qatars-food-industry/, diakses pada tanggal 20 Juli 2022.

¹⁵ UN Comtrade, "Trade Data: Qatar's Import from Saudi Arabia," comtrade.un.org, 2022, <https://comtrade.un.org/data/>.

Dampak Krisis Diplomatik Terhadap Pembangunan Qatar

Qatar dipercayai untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) *World Cup* yang akan dilaksanakan pada 21 November – 18 Desember 2022. Oleh karena itu, untuk menunjang kesiapan Qatar dalam menjadi tuan rumah Qatar sedang menjalankan beberapa pembangunan konstruksi di negaranya. Namun, dampak dari diberlakukannya tindak blokade menyebabkan adanya pemberhentian kegiatan impor bahan konstruksi yang mengakibatkan adanya penundaan dalam pembangunan beberapa proyek.¹⁶

Adanya penutupan akses perbatasan Arab Saudi menuju Dubai menyebabkan Qatar terpaksa harus mengatur kembali jalur masuk dari Dubai menuju negaranya. Sehingga pada Juli 2017 angka impor Qatar menurun sebesar 35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga Qatar tetap melakukan impor bahan bangunan dan mesin yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur walaupun Qatar harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi daripada biasanya.

Dampak Krisis Diplomatik Terhadap Pariwisata Qatar

Wisatawan mancanegara yang sering berkunjung ke Qatar mayoritas berasal dari negara-negara Teluk. Dampak dari tindakan blokade ini terjadinya penurunan sebesar 40% dari total kunjungan biasanya. Maka terjadi penyusutan pendapatan sebesar 11,8% di tahun 2017 pada sektor pariwisata.

Tidak hanya terjadinya pengurangan wisatawan yang datang ke Qatar, sektor penerbangan Qatar Airways

juga terkena imbas dari tindakan blokade ini. Akibat ditutupnya jalur udara di beberapa negara Teluk, jadwal penerbangan Qatar hanya beroperasi 50 jadwal per harinya yang mana hal ini setara dengan 18% dari total kapasitas kursi secara global.

Tidak hanya menghentikan akses transportasi udara, Arab Saudi juga mengambil tindakan untuk menutup seluruh akses baik transportasi darat maupun laut, Arab Saudi melarang masuknya mobil milik Qatar ke wilayah Arab Saudi dan juga melarang kapal-kapal milik Qatar untuk transit di wilayah Arab Saudi. Tindakan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap operasionalisasi Qatar.

Tindakan Arab Saudi terhadap Qatar

Arab Saudi mengeluarkan tiga belas tuntutan yang diberikan kepada Qatar sebagai syarat pemberlakuan blokade tepat dua minggu setelah blokade diberlakukan. Tiga belas tuntutan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi tentunya sudah melalui beberapa pertimbangan dari pihak Arab Saudi bersama dengan negara-negara Teluk lainnya. Sebelum tiga belas tuntutan ini resmi disampaikan kepada Qatar, Menteri Luar Negeri Qatar berusaha untuk melaksanakan dialog terbuka dengan pihak Arab Saudi, namun pertemuan tersebut tidak berhasil mengajak Arab Saudi untuk memberhentikan tindakan blokade terhadap Qatar.

Sehingga setelah dilakukannya mediasi dengan Kuwait, Arab Saudi mengeluarkan tiga belas tuntutan terhadap Qatar tepatnya pada tanggal 23 Juni 2017 sebagai syarat pemberlakuan blokade.

¹⁶ Madelénat, "Coface Economic Publications," 2.

Adapun beberapa tuntutan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi adalah sebagai berikut, (1) membatasi hubungan diplomatik antara Qatar dan Iran, (2) mengakhiri kerja sama pertahanan antara Qatar dan Turki, (3) pemberhentian segala jenis hubungan dan dukungan terhadap kelompok teroris, (4) membebaskan, mengembalikan tokoh-tokoh ataupun individu yang sedang dicari oleh pihak Arab Saudi, (5) memberhentikan segala jenis bantuan dan pendanaan, terhadap kelompok terorisme maupun individu, (6) mengakhiri segala jenis intervensi, (7) penutupan kantor media maupun berita yang mendapatkan pendanaan dari Qatar baik secara langsung maupun tidak langsung, (8) memberhentikan segala jenis siaran dan pemberitaan Al-Jazeera, (9) mengembalikan kebijakan luar negeri Qatar sesuai dengan Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya, (10) memutuskan kontak dengan pihak-pihak oposisi politik di Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir, (11) melakukan pembayaran ganti rugi, (12) menerima seluruh tuntutan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi terhadap Qatar dalam kurun waktu sepuluh hari, (13) menerima pengecakan rutin secara bulanan yang bersifat wajib selama satu tahun pertama yang akan diberlakukan setelah tuntutan ini diterima oleh Qatar.¹⁷

Respon Qatar Terhadap Tiga Belas Tuntutan

Setelah ketiga belas tuntutan tersebut disampaikan kepada pihak Qatar tentunya menimbulkan respon yang tidak baik dari pihak Qatar dan menolak seluruh tuntutan. Sheikh Saif bin Ahmed Al Thani seorang Direktur Kantor Komunikasi Pemerintah Qatar mengatakan daftar tuntutan blokade

¹⁷ DW, "13 Tuntutan Dan Ultimatum Arab Saudi Pada Qatar," dw.com, 2017, <https://www.dw.com/id/13-tuntutan-dan-ultimatum-arab-saudi-pada-qatar/a-39382447>.

merupakan tindakan ilegal yang dikeluarkan oleh Arab Saudi beserta pendukungnya, masalah yang terjadi diantara Qatar dan negara kuartet anti Qatar¹⁸ tidak ada hubungannya dengan memerangi terorisme.

Bahkan tuntutan tersebut dianggap sebagai upaya Arab Saudi untuk membatasi kedaulatan Qatar dan tindakan Arab Saudi yang mencoba untuk mengembalikan kebijakan luar negeri pemerintahan Qatar sesuai dengan kebijakan luar negeri pemerintahannya.¹⁹ Melihat ketiga belas tuntutan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi terhadap Qatar semua poin menunjukkan adanya ketakutan dari pihak Arab Saudi akan tersebarnya ideologi demokrasi melalui kekuatan Qatar bersama dengan organisasi Ikhwanul Muslimin dan kekuatan Iran.

Respon Arab Saudi terhadap Penolakan Qatar dan *The Six Broader Principles*

Tepat satu bulan setelah dikeluarkannya tiga belas tuntutan tersebut, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain menggelar pertemuan pada tanggal 5 Juli 2017 dengan melibatkan Emir Kuwait Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah sebagai pimpinan mediasi yang didukung oleh Amerika Serikat, PBB dan negara-

¹⁸ Kuartet anti Qatar adalah istilah yang digunakan bagi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi yang melakukan tindakan blokade barat, laut, dan udara terhadap Qatar pada tahun 2017. Keempat negara tersebut merancang sebuah langkah untuk menekan Qatar agar dapat mematuhi daftar tuntutan yang dikeluarkan oleh keempat negara tersebut terhadap dugaan dukungan Qatar untuk kelompok ekstremis Islam di Timur Tengah. Penelitian ini akan menggunakan istilah "kuartet anti-Qatar" untuk menyebutkan keempat negara tersebut.

¹⁹ Al Jazeera, "Saudi-Led Demands Not 'Reasonable or Actionable': Qatar," Al-Jazeera, 2017, <https://www.aljazeera.com/news/2017/6/24/saudi-led-demands-not-reasonable-or-actionable-qatar>.

negara Eropa, pertemuan ini bertujuan untuk membicarakan dan meminta masukkan atas respon penolakan Qatar terhadap tiga belas tuntutan awal. Adapun hasil dari pertemuan ini adalah keputusan untuk mengumumkan adanya enam prinsip yang akan diberikan kepada Qatar yang dikenal dengan “*the Six Broader Principles*” yang diumumkan pada tanggal 5 Juli 2017 di Kairo, Mesir.

Prinsip ini bukan merupakan sikap pelunakan yang diambil oleh Arab dan negara-negara Teluk lainnya terhadap Qatar melainkan sebagai suatu proses untuk memulai kembali proses negosiasi antara Arab Saudi dan Qatar. Enam prinsip ini memiliki perbedaan dari tiga belas tuntutan, yang mana tiga belas tuntutan masih menimbang dan menerima segala keputusan dari pihak Qatar untuk menyetujui ataupun menolak ketiga belas tuntutan tersebut. Sedangkan *the Six Broader Principles* berdasarkan pernyataan Duta Besar Arab Saudi Al Mouallimi untuk PBB yang mengatakan bahwa tidak akan ada permintaan persetujuan kepada pihak Qatar.

Enam poin dari *the Six Broader Principles* adalah sebagai berikut, (1) Qatar dapat berkomitmen terhadap tindakan untuk menghentikan segala jenis ekstremisme dan tindakan terorisme, (2) Qatar dilarang untuk menyebarkan sikap yang terkesan menghasut, mempromosikan, maupun membenarkan tindakan kebencian dan kekerasan, (3) Qatar diharuskan untuk kembali membangun komitmen dalam Perjanjian Riyadh 2013 dan 2014 dalam kerangka kerja *Gulf Cooperation Council* (GCC), (4) Qatar juga diwajibkan untuk dapat berkomitmen atas hasil KTT *Arab-Islamic-US* yang diadakan di Riyadh pada Mei 2017, (5) Qatar tidak dibenarkan untuk melakukan intervensi terhadap urusan internal negara lain dan tidak memberikan dukungan terhadap kelompok-kelompok dan entitas yang

dianggap ilegal, (6) Qatar diwajibkan untuk dapat menjalankan tanggung jawab sebagai negara internasional untuk menghadapi segala bentuk ekstremisme dan terorisme sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.²⁰

Arab Saudi mengharapkan Qatar dapat menyetujui keenam prinsip tersebut untuk kembali membangun keamanan kawasan bersama.

Respon Qatar Terhadap *the Six Broader Principles*

The Six Broader Principles ini menghilangkan beberapa poin dari tiga belas tuntutan awal yang dikeluarkan oleh negara kuartet anti Qatar yaitu tuntutan mengenai penutupan stasiun televisi Al-Jazeera, pemutusan hubungan dengan Iran, pengusiran pasukan anggota *The North Atlantic Treaty Organization* (NATO) Turki yang berada di Qatar dan pembayaran ganti rugi terhadap kerusakan yang disebabkan oleh perubahan kebijakan luar negeri Qatar. Setelah diumumkannya *the Six Broader Principles* pada tanggal 5 Juli 2017, keempat negara kuartet anti Qatar memaksa Qatar untuk segera menyetujui dan berkomitmen pada enam prinsip ini pada tanggal 18 Juli 2017.²¹

Qatar menunjukkan respon bahwa pemerintahan Qatar dapat menerima dan bersedia untuk mematuhi enam poin dari *six broader principles* tersebut yang didalam nya mencakup kesediaan Qatar untuk menghentikan pendanaan terhadap

²⁰ Taimur Khan, “Arab Countries’ Six Principles for Qatar’s Measure to Restart the Negotiation Process,” *The National*, 2017, <https://www.thenationalnews.com/world/gcc/arab-countries-six-principles-for-qatar-a-measure-to-restart-the-negotiation-process-1.610314>.

²¹ M Lederer, “Arabs Urge Qatar to Accept 6 Principles to Combat Extremism,” *Apnews*, 2017, <https://apnews.com/article/6eeba50427e14e4eb890ce0dd5c61020>.

kelompok teroris dan menyetujui untuk dijalkannya inspeksi dan audit tahunan terhadap pemerintahan Qatar. Namun, Qatar ingin keenam poin dari the six broader principles tersebut dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap negara-negara Arab lainnya.

Implementasi Qatar Terhadap *the Six Broader Principles*.

Poin pertama dan keenam *the Six Broader Principles* menjelaskan agar Qatar dapat berkomitmen dalam memerangi segala jenis kegiatan terorisme dan ekstremisme dan juga tidak lagi memberikan bantuan berupa pendanaan maupun tempat tinggal bagi tokoh-tokoh terorisme.

Namun, pada November 2017 Qatar melalui *Qatar Foundation* telah membayar gaji bulanan sebesar 35.000 euro kepada Tariq Ramadaan yang merupakan cucu dari salah satu pendiri IM yaitu Hasan Al Banna, uang tersebut digunakan oleh Tariq Ramadan untuk menggagalkan tuduhan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dijatuhkan kepadanya di November 2017.²²

Tidak hanya mendanai tokoh individu IM, Qatar juga terlibat dalam beberapa pembangunan masjid dan pusat-pusat Islam di Eropa, khususnya wilayah Norwedia, *Normandia Island*, dan Prancis dengan total dana yang dikeluarkan sebesar 90 juta euro yang telah berlangsung selama delapan tahun belakang yang sebagian besar dananya berasal dari Diwani Al Amiri, Emir Hamad Al Thani dan *Qatar Charity*. Beberapa masjid dan perpustakaan yang berada di masjid tersebut ditemukan buku-buku yang berkaitan dengan pemimpin IM yang menetap di Qatar

yaitu Yusuf Al Qaradawi dan juga buku-buku yang berkaitan dengan Sayyid Qutob yang merupakan salah satu pemimpin IM yang berasal dari Mesir.

Kebijakan Luar Negeri Qatar

Qatar mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 01 September 1971, Qatar yang dipimpin oleh Sheikh Ahmad Ibnu Ali Al-Thani menjalankan pemerintahan dengan prinsip menjamin keamanan internal dengan cara menjalin hubungan dengan Arab Saudi yang dikenal sebagai tahap interdependensi. Terjalannya hubungan bilateral antara Qatar dan Arab Saudi merupakan salah satu langkah Qatar untuk memperkuat keamanan negaranya yang pada saat itu masih dalam keadaan rentan.

Pada tahun 1982 ketika Qatar telah cukup kuat sebagai negara independen, melalui perdana menteri Sheikh Khalifah menyampaikan bahwa Qatar tidak akan secara penuh menjalin hubungan kerja sama dengan Arab Saudi saja, Qatar akan berusaha untuk melakukan kerja sama dengan negara lainnya khususnya pada sektor keuangan untuk memperkuat negaranya.²³

Kekayaan sumber daya alam Qatar yang didapatkan melalui gas alam dan minyak bumi menjadikan Qatar semakin kuat sebagai negara yang baru saja mendapatkan kemerdekaan. Oleh karena itu, Qatar mulai melibatkan diri dalam kerja sama di bidang energi, keuangan serta keamanan. Tidak hanya itu, Qatar juga membangun citra negara dengan turut aktif dalam menjadi mediator konflik, tepatnya pada masa pemerintahan Emir Sheikh Hamad Al-Thani di tahun 1995 Qatar mulai merancang kebijakan luar negeri yang

²² Sami Moubayd, "How Qatar Funds Muslim Brotherhood Expansion in Europe," Gulf News, 2019, <https://gulfnews.com/world/gulf/qatar/how-qatar-funds-muslim-brotherhood-expansion-in-europe-1.63386835>.

²³ David B Roberts, "The Four Eras of Qatar Foreign Policy," *Journal of International Relations*, 2016, 5.

berlandaskan pada kebijakan *open door policy*.

Namun, pada saat terjadinya peristiwa Arab Spring yang dimana seluruh negara Arab ditakutkan akan pemikiran-pemikiran demokrasi yang muncul di kawasan Timur Tengah menjadikan Qatar mulai bergerak untuk keluar dari pengaruh kebijakan Arab Saudi yang pada masa ini dikenal sebagai masa konfrontasi kebijakan luar negeri Qatar yang berujung pada krisis diplomatik yang mengakibatkan terputusnya hubungan bilateral Arab Saudi dan Qatar tepatnya di tanggal 5 Juni 2017.

Qatar's Open Door Policy

Masalah terbesar yang sedang dihadapi oleh Qatar dalam menghadapi krisis adalah tindakan blokade dan isolasi besar-besaran yang disertai dengan berbagai tuntutan dan ancaman yang dijatuhkan oleh negara kuartet anti Qatar tersebut.

Berdasarkan konsep kebijakan luar negeri sebagai rangkaian untuk berkomitmen dan membuat rencana dalam bertindak (*foreign policy as a set of commitments to and plan for action*)²⁴ konsep ini merupakan suatu konsep kebijakan luar negeri yang memiliki tujuan dimana para pembuat kebijakan luar negeri membuat suatu rancangan dan komitmen untuk menjaga keamanan nasional negaranya dalam menghadapi tantangan dan ancaman dari lingkungan eksternal. Maka melihat posisi Qatar yang mendapatkan tuntutan dan ancaman dari negara kuartet anti Qatar mengharuskan Qatar mengambil dan menjalankan kebijakan luar negerinya yang mana dalam hal ini Qatar mengembangkan prinsip kebijakan luar negeri "*open door policy*" demi

mempertahankan kedaulatan serta mengamankan kepentingan nasional negaranya dengan cara membangun beberapa hubungan dan kerjasama dengan beberapa negara dan organisasi internasional yang ada demi menjaga kestabilan nasional negaranya dan membangun kembali negaranya pasca diberlakukannya blokade terhadap Qatar oleh negara-negara tetangganya.

Awal mula lepasnya Qatar dari pengaruh Arab Saudi adalah ketika Qatar mulai menjalin kerja sama dengan Iran tepatnya di tahun 1991 yang mana Qatar dan Iran berkerja sama dalam pembangunan lapangan gas terbesar di Kawasan Timur Tengah yang disebut sebagai North Field dan South Pars.²⁵ Pada masa kepemimpinan Sheikh Hamad terjadi beberapa reformasi kebijakan yang mana hal ini merupakan langkah awal dari liberalisasi dan demokratisasi Qatar.

Namun, terjadi perubahan pada masa transisi kepemimpinan Emir Syekh Hamid Al-Thani yang kedudukannya digantikan oleh Emir Syekh Tamim Al-Thani, Qatar mulai menerapkan dan mengembangkan prinsip kebijakan luar negeri "*open door policy*" yang memiliki tujuan untuk memperkuat perdamaian dan keamanan internasional. Prinsip *open door policy* ini sendiri merupakan bentuk nyata dari keinginan Qatar untuk lepas dari pengaruh Arab Saudi pasca peristiwa Pan-Arabisme.

Dalam salah satu pidatonya Dalam pidatonya Emir Sheikh Tamim Al-Thani menyatakan bahwa Qatar merupakan negara yang penuh visi dan menghormati semua modernisasi politik yang terjadi, selain itu Qatar juga menerima segala

²⁴ James N Rosenau, Gavin Boyd, *World Politics: An Introduction*, 16–17.

²⁵ Reuters, "Factbox: Qatar, Iran Share World's Biggest Gas Field," reuters.com, 2010, <https://www.reuters.com/article/us-northfield-qatar/factbox-qatar-iran-share-worlds-biggest-gas-field-idUSTRE66P1VV20100726>.

jenis aliran dan pemikiran yang ada di seluruh negara sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Sheikh Tamim Al-Thani merupakan kebijakan yang lebih modern, fleksibel dan terbuka.

Implementasi *Open Door Policy* melalui Peningkatan Kondisi Domestik Pasca Blokade

Pasca diberlakukannya tindakan blokade, pasokan bahan pangan Qatar yang beberapa dihasilkan melalui kegiatan ekspor antara Arab Saudi dan Qatar yang terhenti mengakibatkan terjadinya krisis pangan di Qatar. Menanggapi keadaan tersebut pemerintah Qatar segera mengambil langkah yang cepat demi mengatasi krisis ekonomi yang sedang menimpa negaranya dengan cara melakukan pemanfaatan cadangan devisa milik *Qatar Investment Authority* (QIA) yang diperkirakan Qatar memiliki cadangan devisa sekitar \$213,7 miliar yang didapatkan oleh Qatar dari kegiatan ekspor gas alamnya.²⁶

Qatar sebagai negara dengan kebijakan luar negeri yang independen mengambil langkah untuk menjadi lebih mandiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan negaranya, Qatar melakukan swasembada pangan secara independen dan tidak lagi bergantung kepada Arab Saudi.

Qatar telah berhasil melakukan swasembada pangan dari beberapa produk pangan yang sering digunakan oleh masyarakat Qatar. Produk susu merupakan salah satu produk yang diimpor dari Arab Saudi sekitar 72% sebelum diberlakukannya blokade. Namun, setelah diberlakukannya blokade

²⁶ Paul Cochrane, "Gas and the Gulf Crisis: How Qatar Could Gain the Upper Hand," *middleeasteye.net*, 2017, <https://www.middleeasteye.net/big-story/gas-and-gulf-crisis-how-qatar-could-gain-upper-hand>, diakses pada tanggal 02 Juli 2022.

Qatar berusaha untuk menghasilkan produk susu milik negaranya sendiri. Di tahun 2017 Qatar hanya dapat memproduksi sebanyak 60.000 ton susu sapi sedangkan di tahun 2019 sangat meningkat pesat yang mana Qatar berhasil menghasilkan sebanyak 230.000 ton susu sapi sehingga terjadi kenaikan sekitar 117% dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.²⁷

Perusahaan *Qatar Power International* telah melakukan pembelian sapi dari Amerika Serikat dan Eropa guna menunjang lancarnya proses produksi pasukan susu negaranya. Baladna sebagai salah satu produsen susu utama di Qatar membeli sekitar 18.000 sapi perah jenis Holstein yang akan dikirimkan secara bertahap. Pada 12 Juli 2017, sekitar 230 sapi perah Holstein yang berasal dari Eropa telah sampai di Qatar, sapi-sapi ini dikirimkan melalui jalur udara yaitu dengan menggunakan pesawat kargo Qatar Airways Boeing 777 yang melewati jalur udara Budapest dan langsung dikirimkan ke peternakan susu milik Qatar.²⁸

Tidak hanya daging merah saja Qatar juga meningkatkan peternakan ayam yang mengalami kenaikan sekitar 124% dari tahun 2017 yang hanya memproduksi sekitar 11.000 ton ayam meningkat ke angka 28.000 ton di tahun 2019.²⁹

²⁷ Hadeel Al Sayegh, "Qatar Builds Dairy Industry in Desert as It Defies Arab Boycott," *reuters.com*, 2017, <https://www.reuters.com/article/us-gulf-qatar-cows-idUSKBN1DT2E9>, diakses pada tanggal 02 Juli 2022.

²⁸ "Qatar Crisis: Air-Lifted Cows Start Arriving in Doha," *bbc.com*, 2017, <https://www.bbc.com/news/business-40578167>, diakses pada tanggal 02 Juli 2022.

²⁹ Eric Knecht, "With Cows, Chickens and Greenhouses, Qatar Takes on Regional Boycott," *reuters.com*, 2019, <https://www.reuters.com/article/uk-gulf-qatar-idUKKCN1T614L>, diakses pada tanggal 02 Juli 2022.

Implementasi Open Door Policy melalui Peningkatan Hubungan Kerja sama Internasional.

Konsep *Preservative Adaption* yang menjelaskan mengenai keadaan dimana suatu negara memberikan respon terhadap tekanan dan perubahan yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal.³⁰ Sehingga konsep *Preservative Adaption* merupakan konsep kebijakan menurut Rosenau yang sangat berkaitan dengan posisi Qatar yang tengah menghadapi krisis diplomatik dengan beberapa negara tetangganya, yaitu Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Mesir yang mana keadaan ini sangat mengancam posisi ketahanan nasional negara Qatar, sehingga melalui kebijakan “*open door policy*” Qatar mulai kembali bangkit dan berusaha untuk mempertahankan kedaulatan negaranya dengan menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara lainnya, seperti Iran, Turki dan Amerika Serikat.

Hubungan Qatar dan Iran

Qatar dan Iran merupakan dua negara yang memiliki salah satu ladang gas terbesar di dunia yang sering dikenal dengan nama Ladang Gas-Kondesat yang terletak di Teluk Persia. Dengan pembagian kepemilikan *North Field* (milik Qatar) dan *South Pars* (milik Iran). Qatar memiliki sekitar 13% dari cadangan gas alam yang dapat menghasilkan 650 juta m² gas per harinya serta Iran yang dapat menghasilkan sekitar 5.750 juta m² gas alam dalam per harinya.³¹

³⁰ James N. Rosenau, *The Study of Political Adaption: Essays on the Analysis of World Politics* (New York: Nichols Publishing, 1981), 42.

³¹ Muhammad Rizal Saanun, “Chapter Iv Qatar ’ S Foreign Policy Strategy To Overcome Gulf States ’ Diplomatic” (2018), 71–72.

Keinginan Qatar untuk meningkatkan nilai perdagangan antar kedua negara yang awalnya bernilai sekitar \$1 miliar per tahunnya menjadi lima kali lipat dengan nilai sekitar \$5 miliar per tahunnya,³² Nilai perdagangan yang direncanakan akan naik menjadi lima kali lipat telah dicapai oleh kedua negara ini, dengan kenaikan \$50 juta menjadi \$139 juga dari total pada tahun sebelumnya.³³

Qatar dan Iran sepakat dalam membentuk komite transportasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membuka jalur transportasi udara dan laut antara kedua negara. Kesepakatan ini ditunjukkan dengan penandatanganan *Joint Trade Committee* pada Oktober 2017.

Hubungan Qatar-Turki

Pada sektor ekonomi, Turki telah melakukan kegiatan ekspor dalam bentuk makanan dengan total ekspor \$32,5 juta dan \$12,5 juta, nilai ekspor ini meningkat tiga kali lipat atau sekitar 51% dari angka normal kerja sama ekonomi antara kedua negara. Turki dan Qatar juga telah menandatangani lima belas perjanjian perdagangan pada Agustus 2017.

Qatar harus memperkuat angkatan militernya untuk menjaga keamanan nasionalnya. Hal ini didukung oleh pemerintahan Turki dengan cara membangun pangkalan militer milik Turki di wilayah Qatar yang dikenal dengan nama *Tariq bin Ziyad* dan gabungan personil militer Qatar dan Turki diberi nama *The Qatar-Turkey Combined Joint Fore Command*. Tepat pada tanggal 18 Juni 2017, Turki mengirimkan 23 personil militernya dan juga mengirimkan lima kendaraan berlapis baja kepada Qatar. Menurut

³² Saanun, 74.

³³ Saanun, 74.

laporan salah satu media Turki lapangan militer tersebut sudah diperluas pada Oktober 2017 dengan penambahan pangkalan udara dan pelabuhan militer.³⁴

Hubungan Qatar-Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan salah satu negara sekutu Arab Saudi, namun dalam krisis diplomatik yang terjadi antara Arab Saudi dan Qatar bukanlah permasalahan yang hanya memberikan dampak terhadap kondisi internal kedua negara saja tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap sistem keamanan regional. Sehingga AS sebagai negara yang memiliki kepentingan di Qatar khususnya dalam bidang militer yang mana AS memiliki pangkalan militer yang didirikan tahun 2001 yang bersamaan dengan penugasan Angkatan Udara AS di Afganistan. Qatar dan AS menjalin kerja sama dibidang keamanan dan pertahanan yang mana kedua negara ini telah memiliki perjanjian kerja sama dalam bidang pertahanan sejak tahun 1992 yang mana perjanjian ini berisikan pemberian izin bagi AS untuk mendirikan markas Komando Regional (US Central Command/CETCOM) di wilayah Qatar serta Qatar juga mendanai dan mengelola konstruksinya dengan harga yang diperkirakan sekitar \$1,8 miliar.

Qatar Open Door Policy melalui Peningkatan Strategis Mediasi melalui Lembaga Internasional

Qatar mengambil langkah untuk melakukan mediasi melalui beberapa lembaga internasional yang ada, seperti Dewan Kerjasama Teluk (GCC), Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dan Uni Eropa (UE). Qatar sebagai negara

dengan konstitusi yang berlandaskan kepada negara yang bertekad untuk mewujudkan perdamaian dunia melalui *soft power* mempercayai bahwa mediasi merupakan solusi yang terbaik untuk menghindari konflik serta mencegah dampak-dampak yang akan timbul pasca terjadinya suatu konflik.

Dewan Kerja sama Teluk (GCC)

Qatar mengambil langkah untuk melakukan mediasi melalui GCC dengan cara menyakinkan Kuwait melalui diplomasi agar Kuwait dapat menjadi mediator dalam penyelesaian krisis antara negara-negara anggota GCC, maka setelah melalui pembicaraan panjang GCC setuju untuk melakukan mediasi melalui *Gulf Cooperation Council Summit 2017* yang merupakan GCC Summit yang ke-38 yang diadakan pada tanggal 5 Desember 2017 tepatnya di kota Kuwait.

Qatar mendapatkan perhatian lebih serta dukungan dari Oman dan Kuwait sebagai bagian dari anggota GCC yang bersedia untuk membantu Qatar dalam penyelesaian krisis dan blokade. Tidak hanya Oman dan Kuwait, GCC sebagai ranah advokasi dan diplomasi telah berkontribusi dalam mendukung Qatar untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan. Serta hasil akhir dari GCC Summit ke-38 ini adalah adanya pembentukan komite khusus yang akan menjadi badan yang membantu Qatar dan negara-negara kuartet anti Qatar untuk mempercepat perdamaian dan keamanan regional.³⁵

Adapun hasil dari pertemuan ini adalah, keenam negara yang sedang terlibat dalam konflik, yaitu Arab Saudi, UEA, Bahrain, Mesir dan Kuwait beserta

³⁴ Metin Gurcan, "Turkey's Military Base in Qatar to Expand with Air, Naval Elements," *Al-Monitor*, 2019, <https://www.al-monitor.com/originals/2019/08/turkey-qatar-military-cooperation-expand-with-air-naval.html>, diakses pada tanggal 21 Juni 2022.

³⁵ Saanun, "Chapter Iv Qatar ' S Foreign Policy Strategy To Overcome Gulf States ' Diplomatic," 88.

Qatar dapat bertemu secara langsung dan bersedia untuk membuka dialog mengenai penyelesaian krisis.

Uni Eropa (UE)

Krisis diplomatik yang sedang berlangsung tidak hanya menjadi isu politik yang kritis bagi negara-negara Timur Tengah saja, tetapi Uni Eropa juga menganggap krisis ini sebagai suatu permasalahan yang sangat serius.³⁶ Menurut pandangan Uni Eropa krisis diplomatik ini dapat mengganggu dan menghambat perkembangan kerja sama ekonomi dan politik antar kedua negara serta krisis ini juga akan mempengaruhi kepentingan Uni Eropa di kawasan Timur Tengah maupun Teluk.

Qatar telah mendapatkan dukungan dari Uni Eropa untuk menyelesaikan masalah yang sedang menimpa negaranya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pertemuan antara Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani bertemu dengan Perwakilan Tinggi Uni Eropa Federica Mogherini dengan tujuan membuka dialog mengenai kesediaan Uni Eropa untuk membantu Qatar menyelesaikan permasalahan yang tengah melanda negaranya, yang mana pertemuan ini dilakukan pada tanggal 9 Juni 2017. Setelah pertemuan pertama di tanggal 9 Juni 2017, sepuluh hari kemudian tepatnya di tanggal 19 Juni 2017, Uni Eropa menyampaikan kesediaannya untuk mendukung upaya mediasi yang akan dipimpin oleh Kuwait.³⁷

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Melalui sidang Majelis Umum ke-72 Qatar menyuarakan agar semua negara dapat mendukung niat Qatar untuk melakukan rekonsiliasi konfliknya

dengan negara kuartet anti Qatar dan mengajak seluruh negara agar dapat berpartisipasi sebagai mediator atau pihak yang dapat membantu Qatar untuk mewujudkan normalisasi dan stabilitas di kawasan Teluk. Tidak hanya itu saja, Qatar juga menyampaikan bahwa pentingnya dilaksanakan dialog tanpa syarat yang berlandaskan prinsip saling menghormati kedaulatan serta mempercepat proses perdamaian di kawasan Teluk.

Pada pidato Emir Tamim Al-Thani menyampaikan dua poin utama yang disampaikan oleh Emir Tamim Al-Thani adalah, mengedepankan kepentingan internal dan mengajak seluruh negara untuk dapat bekerja sama dengan Qatar, dan poin kedua adalah kepentingan secara internasional dengan cara menginformasikan kepada negara-negara di luar kawasan Timur Tengah khususnya negara-negara Barat bahwa Qatar siap untuk menyelesaikan masalahnya dan Qatar berharap seluruh negara dapat mengurangi kekhawatiran terhadap isu pendanaan terorisme serta isu yang mengatakan bahwa Qatar melakukan dukungan terhadap kelompok-kelompok terorisme dan ekstrimisme.³⁸

Implementasi kebijakan luar negeri Qatar yang independen, terbuka dan modern terlihat dalam keberhasilan Qatar dalam meyakinkan setiap pihak dan badan-badan PBB untuk membantu negaranya dalam menyelesaikan krisis diplomatik. Sehingga Qatar mendapatkan lebih banyak dukungan dari negara-negara anggota PBB.

Kondisi Hubungan Qatar dengan kuartet anti Qatar 2019-2021

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menyampaikan bahwa pertimbangan

³⁶ Saanun, 89.

³⁷ Saanun, 89.

³⁸ Saanun, 91.

mengenai resolusi konflik sudah dibicarakan dan dalam tahap penyelesaian, resolusi ini juga telah mendapatkan dukungan dari UEA, Bahrain dan Mesir. Resolusi konflik ini tidak hanya membahas permasalahan blokade tetapi juga membahas isu lain seperti, isu sengketa perbatasan.

Pada awal tahun 2021 tepatnya di tanggal 05 Januari 2021 pada pelaksanaan KTT GCC ke-41 yang diadakan di Al-Ula, Madinah, Arab Saudi. Pemimpin Arab Saudi menyampaikan sepakat untuk membuka kembali jalur perbatasan darat dan udara negaranya menuju Qatar.

Selain itu KTT yang dihadiri oleh pemimpin UEA, Arab Saudi, Qatar, Oman, Kuwait dan Bahrain juga menghasilkan ditandatangani dua dokumen kerja sama negara-negara GCC yang dikenal dengan, Deklarasi Al-Ula dan komunika akhir. Deklarasi Al-Ula bertujuan untuk memerangi kelompok-kelompok yang dianggap dapat mengancam kedaulatan negara-negara Teluk dan komunika akhir berisikan tentang penguatan kerja sama negara-negara GCC dalam memerangi kelompok-kelompok teroris dan menekankan bahwa melalui dokumen ini negara-negara GCC sepakat untuk kembali besatu dan membangun tujuan GCC.

KESIMPULAN

Qatar mulai bangkit dan memperluas kekuatannya pada masa kepemimpinan Syeikh Hamad bin Khalifa Al-Thani sejak tahun 1995. Kepemimpinan Emir Hamad Al-Thani menjadikan Qatar sebagai salah satu *emerging power* serta berani membawa Qatar kepada kebijakan luar negeri yang mengacu pada perdamaian dan stabilitas kawasan melalui kebijakan luar negeri yang demokrasi, independen dan liberal.

Berlanjut kepada masa kepemimpinan Emir Syeikh Tamim Al-Thani menggantikan kepemimpinan ayahnya Syeikh Hamad Al-Thani pada tahun 2013 yang mana gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Syeikh Hamad Al-Thani terkesan cukup berani dan mencoba untuk melepaskan kebijakan luar negeri Qatar dari pengaruh sistem pemerintahan Arab Saudi yang masih terkesan tradisional dan berlandaskan pada syariat-syariat islam.

Tindakan blokade yang ditujukan terhadap Qatar tentunya menyebabkan ketidakstabilan keadaan internal negara Qatar. Sehingga Qatar mengalami beberapa permasalahan pasca krisis diplomatik diberlakukan, mulai dari permasalahan kekurangan pasokan bahan pangan, larangan penerbangan, harga minyak bumi yang tidak stabil, serta mengganggu stabilitas kegiatan perekonomian dan perbankan.

Ketika Qatar menghadapi krisis internal negaranya, negara kuartet anti Qatar mengeluarkan tuntutan kepada Qatar sebagai syarat pemberlakuan blokade yang berisikan tiga belas tuntutan yang harus dipenuhi oleh Qatar. Namun, sebagai negara berdaulat Qatar menganggap tiga belas tuntutan yang diberikan terhadap negaranya merupakan keputusan yang tidak memiliki kekuatan secara hukum. Sehingga, pemerintahan Qatar menanggapi tiga belas tuntutan tersebut dengan melakukan penolakan, dan cenderung menyelesaikan krisis ini melalui proses diplomasi dan negosiasi.

Melalui teori kebijakan luar negeri yang memiliki tujuan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara dari ancaman yang datang dari lingkungan eksternal sehingga dapat mengganggu kedaulatan suatu negara, maka Qatar sebagai negara yang merdeka mulai merancang ulang strategi kebijakan luar

negerinya melalui kebijakan *open door policy* yang mana kebijakan sebagai salah satu instrumen yang dikeluarkan oleh negara Qatar untuk merespon tindakan blokade yang dijatuhkan terhadap kedaulatan negara Qatar sehingga *open door policy* ini membuka jalan bagi Qatar untuk dapat menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara di luar kawasan Teluk. Sehingga Qatar mulai meningkatkan efektivitas hubungan diplomatiknya dengan beberapa negara seperti, Iran, Turki, serta Amerika Serikat, yang mana keputusan ini diambil sebagai solusi jangka pendek dalam rangka mewujudkan kembali stabilitas negara Qatar selama krisis melanda.

Tidak hanya menjalin hubungan dengan negara-negara di luar kawasan Teluk, Qatar juga menunjukkan implementasi kebijakan luar negeri *open door policy* melalui penerapan *soft power* nya untuk membangun relasi dengan lembaga internasional dan regional seperti *Gulf Cooperation Council* (GCC), Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) serta Uni Eropa (UE).

Sementara itu, dalam strategi kebijakan luar negerinya, Qatar juga menekankan pentingnya pembicaraan secara damai, negosiasi dan diplomasi dalam menghadapi krisis dan penyelesaian suatu konflik. Sehingga krisis diplomatik ini dapat diselesaikan pada tanggal 5 Januari 2021 tepatnya pada pelaksanaan GCC Summit ke 41 di Al-Ula, Madinah.

Daftar Pustaka

Buku

- James N Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, 1976.
- Macaron, J. *Crisis In The Gulf Cooperation Council : Challenges And Prospects*. Washington DC: Arab Center Washington DC,

Inc., 2017.

- Mohtar, Mas' oed. *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis Dan Teorisi*. Yogyakarta: PAU - SS UGM, 1989.
- Rosenau, James N. "Comparing Foreign Policies: Why, What, How,." In *Comparing Foreign Policies, Theories, Findings, and Methods*, 6. New York: John Wiley & Sons, 1974.
- Jurnal**
- Madelénat, Erwan. "Coface Economic Publications." *Coface Economic Publications Panorama*, no. March 2017 (2020): 1–12.
- McSparren, Jason J., Hany Besada, and Vasundhara Saravade. "Qatar's Global Investment Strategy for Diversification and Security in the Post-Financial Crisis Era." *Centre on Governance Research Paper Series*, no. June 2020 (2017). https://socialsciences.uottawa.ca/governance/sites/socialsciences.uottawa.ca/governance/files/cog_research_paper_02_17_en.pdf.
- Petersen, Nikolaj. "Adaptation as a Framework for the Analysis of Foreign Policy Behavior." *Cooperation and Conflict* 12, no. 4 (1977): 221–50. <https://doi.org/10.1177/001083677701200402>.
- Powers, Shawn. "The Geopolitics of The News: The Case of The Al-Jazeera Network," no. August (2009): 1–296.
- Roberts, David B. "The Four Eras of Qatar Foreign Policy." *Journal of International Relations*, 2016.
- Rosania ayu, Ningtyas. "Peran Al-Jazeera Dalam Pemutusan Hubungan Diplomatik Arab Saudi Terhadap Qatar Tahun 2017." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31356/%5BBAB>

- 4%5D.pdf?sequence=8&isAllowed=y.
- . *The Study of Political Adaption: Essays on the Analysis of World Politics*. New York: Nichols Publishing, 1981.
- Saanun, Muhammad Rizal. “Chapter Iv Qatar ’ S Foreign Policy Strategy To Overcome Gulf States ’ Diplomatic,” 2018.
- Wardoyo, Broto. “Rivalitas Saudi-Qatar Dan Skenario Krisis Teluk.” *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2018): 82–83. <https://doi.org/10.18196/hi.71127>.
- Website**
- Cochrane, Paul. “Gas and the Gulf Crisis: How Qatar Could Gain the Upper Hand.” *middleeasteye.net*, 2017. <https://www.middleeasteye.net/big-story/gas-and-gulf-crisis-how-qatar-could-gain-upper-hand>.
- Comtrade, UN. “Trade Data: Qatar’s Import from Saudi Arabia.” *comtrade.un.org*, 2022. <https://comtrade.un.org/data/>.
- Data, Ceic. “Qatar PDB Nominal.” *ceicdata.com*, 2017. <https://www.ceicdata.com/id/indicator/qatar/nominal-gdp>.
- DW. “13 Tuntutan Dan Ultimatum Arab Saudi Pada Qatar.” *dw.com*, 2017. <https://www.dw.com/id/13-tuntutan-dan-ultimatum-arab-saudi-pada-qatar/a-39382447>.
- Gurcan, Metin. “Turkey’s Military Base in Qatar to Expand with Air, Naval Elements.” *Al-Monitor*, 2019. <https://www.al-monitor.com/originals/2019/08/turkey-qatar-military-cooperation-expand-with-air-naval.html>.
- Jazeera, Al. “Saudi-Led Demands Not ‘Reasonable or Actionable’: Qatar.” *Al-Jazeera*, 2017. <https://www.aljazeera.com/news/2017/6/24/saudi-led-demands-not-reasonable-or-actionable-qatar>.
- Khan, Taimur. “Arab Countries’ Six Principles for Qatar’s Measure to Restart the Negotiation Process’.” *The National*, 2017. <https://www.thenationalnews.com/world/gcc/arab-countries-six-principles-for-qatar-a-measure-to-restart-the-negotiation-process-1.610314>.
- Knecht, Eric. “With Cows, Chickens and Greenhouses, Qatar Takes on Regional Boycott.” *reuters.com*, 2019. <https://www.reuters.com/article/uk-gulf-qatar-idUKKCN1T614L>.
- Lederer, M. “Arabs Urge Qatar to Accept 6 Principles to Combat Extremism.” *Apnews*, 2017. <https://apnews.com/article/6eeba50427e14e4eb890ce0dd5c61020>.
- Moubayd, Sami. “How Qatar Funds Muslim Brotherhood Expansion in Europe.” *Gulf News*, 2019. <https://gulfnews.com/world/gulf/qatar/how-qatar-funds-muslim-brotherhood-expansion-in-europe-1.63386835>.
- “Qatar Crisis: Air-Lifted Cows Start Arriving in Doha.” *bbc.com*, 2017. <https://www.bbc.com/news/business-40578167>.
- Reuters. “Factbox: Qatar, Iran Share World’s Biggest Gas Field.” *reuters.com*, 2010. <https://www.reuters.com/article/us-northfield-qatar/factbox-qatar-iran-share-worlds-biggest-gas-field-idUSTRE66P1VV20100726>.
- Sayegh, Hadeel Al. “Qatar Builds Dairy Industry in Desert as It Defies Arab Boycott.” *reuters.com*, 2017. <https://www.reuters.com/article/us-gulf-qatar-cows-idUSKBN1DT2E9>.
- Wintour, Patrick. “Qatar Given 10 Days to Meet 13 Sweeping Demands by Saudi Arabia.” *The Guardian*, 2017.

<https://www.theguardian.com/world/2017/jun/23/close-al-jazeera-saudi-arabia-issues-qatar-with-13-demands-to-end-blockade>.

Wyatt, Kym. "Where Does Our Food Come From? An Insight Into Qatar's Food Industry."

dohafamily.com, 2020.

https://dohafamily.com/living_in_doha/where-does-our-food-come-from-an-insight-into-qatars-food-industry/.